

Program Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dalam Bingkai Sistem -Aktor

Ade Putranto Prasetyo Wijiharto Tunggal^{*}, Arif Bimantara², Erwin Rasyid³

¹Komunikasi, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

²Bioteknologi, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

³Komunikasi, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

*ade.putra.tunggali@unisayogya.ac.id

Abstrak

Keywords:

Dinamika
Komunikasi Sistem-
Aktor, Komunikasi
Pembangunan,
Program CBIB

Program CBIB di wilayah pesisir Pantai Selatan Kabupaten Bantul, termasuk dalam salah satu kebijakan pembangunan, dan karenanya perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan penuh terhadap program yang akan dijalankan. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Bantul untuk mensosialisasikan program tersebut adalah dengan melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah, melalui perantara Tim Kerja CBIB (Timker CBIB). Dengan menggunakan metode studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika komunikasi yang terjadi diantara para aktor-aktor selama proses komunikasi berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama proses komunikasi, para aktor membawa motivasi dan kepentingan mereka masing-masing, yang kemudian mempengaruhi kecenderungan sikap terhadap program translokasi. Motivasi para aktor secara garis besar terpusat pada empat elemen, yakni sosial budaya, ekonomi, politik dan lingkungan

1. PENDAHULUAN

Industri perikanan dan tambak udang termasuk salah satu industri yang menjanjikan peningkatan taraf hidup bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada di wilayah pesisir pantai, termasuk di Pantai Selatan Pulau Jawa. Sejak tahun 2014, Kabupaten Bantul, menjadi salah satu lokasi favorit untuk mengembangkan budidaya tambak udang. Aktivitas ini berkembang mulai dari kawasan Pantai Kuaru, Pantai Baru, Pantai Pandansimo, Pantai Glagah dan sebagian Pantai Depok. Namun, kegiatan yang memberikan dampak positif bagi

sebagian masyarakat ini, bukan berarti tidak menimbulkan permasalahan bagi masyarakat lainnya dan lingkungan. Setelah beberapa tahun, permasalahan yang melingkupi Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan Program Cara Budidaya ikan yang baik (CBIB) dengan tujuan membenahi kantong-kantong budidaya perikanan yang dianggap menyalahi peraturan.

Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep. 02/MEN/2007 mengenai pedoman Cara Budidaya Ikan

yang Baik (CBIB) untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditas perikanan budidaya di Indonesia. Cara budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan atau membersarkan ikan serta aman hasilny dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologi. Beberapa ketentuan keamanan pangan pada usaha pembesaran ikan yang tercantum pada pedoman tersebut antara lain:

1. Keamanan pangan pada usaha pembesaran diterapkan pada proses pra produksi dan produksi termasuk penggunaan pakan, bahan kimia, dan bahan biologis, serta obat ikan.
2. Proses praproduksi meliputi:
 - a. pemilihan lokasi;
 - b. penentuan tata letak dan konstruksi;
 - c. pemilihan wadah.
3. Pemilihan lokasi harus memenuhi persyaratan:
 - a. dibangun pada lokasi yang terhindar dari kemungkinan terjadinya pencemaran, jauh dari permukiman, industri, serta lahan pertanian dan peternakan;
 - b. kualitas air sumber sesuai dengan peruntukannya, tidak mengandung residu logam berat, pestisida, organisme patogen, cemaran, dan bahan kimia berbahaya lainnya;
4. Penentuan tata letak dan konstruksi mencakup:
 - a. saluran pasok dan saluran buang;
 - b. tandon pasok pada budidaya udang intensif dan semi intensif;
 - c. tempat penyimpanan pakan, pupuk, obat ikan, pestisida, bahan bakar minyak, dan peralatan budidaya;
 - d. fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), toilet, dan septic tank.
5. Pembangunan saluran pasok dan saluran buang memenuhi persyaratan:
 - a. dibuat terpisah;
 - b. tidak melalui daerah pemukiman, daerah industri, serta lahan pertanian dan peternakan.
6. Tempat penyimpanan pakan, pupuk, obat ikan, pestisida, bahan bakar minyak, dan peralatan budidaya memenuhi persyaratan:
 - a. dibuat terpisah;
 - b. terletak di tempat yang aman dan tertutup dengan sirkulasi udara yang baik;
 - c. bebas hama dan binatang peliharaan;
 - d. dilengkapi dengan fasilitas pencucian tangan.
7. Pembangunan fasilitas MCK, toilet, dan septic tank terletak minimum 10 meter dari petak pemeliharaan dan saluran.
8. Pemilihan wadah budidaya tidak terbuat dari bahan yang beracun dan berbahaya dan berpotensi mencemari produk serta tidak mudah korosif.
9. Proses produksi pada usaha pembesaran meliputi persiapan lahan/wadah budidaya, penumbuhan pakan alami, pemilihan benih, pengelolaan air, penggunaan pakan, obat ikan, pupuk, probiotik, desinfektan, dan bahan kimia lain serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan.
10. Persiapan lahan/wadah memenuhi persyaratan:
 - a. tidak menggunakan pupuk, probiotik, pestisida, dan desinfektan terlarang;
 - b. penggunaannya sesuai dengan peruntukan serta sudah memiliki nomor pendaftaran.
11. Penumbuhan pakan alami tidak menggunakan pupuk dan bahan additive serta penggunaannya sesuai dengan peruntukannya dan sudah memiliki nomor pendaftaran.
12. Pengelolaan air dilakukan sebelum, selama, dan setelah proses produksi dengan tidak menggunakan probiotik terlarang serta bila diperlukan dilakukan filterisasi dan

upaya pengendapan dalam wadah tandon tersendiri.

13. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dengan menerapkan pengamanan biologi (biosecurity), pemulihan kualitas air dengan tidak menggunakan probiotik dan bahan kimia terlarang.
14. Pengamanan biologi mencakup antara lain bebas hama/patogen dan binatang peliharaan serta tindakan isolasi terhadap ikan yang terserang penyakit.
15. Pemilihan benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat.

Penggunaan pakan ikan juga diatur dalam pedoman budidaya ikan tersebut. Ketentuan yang harus dipenuhi dalam penggunaan pakan ikan antara lain:

1. Penggunaan pakan ikan pada proses produksi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengandung nutrisi yang terdiri dari sumber kalori dan protein sesuai kebutuhan dari masing-masing jenis dan umur ikan;
 - b. meningkatkan pertumbuhan atau keindahan penampilan (eksotika) ikan secara optimal;
 - c. tidak mengandung zat beracun, bahan pencemaran yang berbahaya bagi ikan dan/atau manusia, atau yang mengakibatkan penurunan produksi atau menyebabkan pencemaran/kerusakan lingkungan;
 - d. tidak mengandung antibiotik dan hormon;
 - e. pakan telah terdaftar atau bersertifikat;
 - f. masih layak digunakan melalui proses uji mutu;
 - g. tidak mengalami perubahan fisik (tekstur, warna, dan bau);
 - h. kemasan, wadah, atau pembungkusannya tidak rusak;
 - i. menggunakan bahan baku, pelengkap pakan, dan imbuhan pakan yang memenuhi persyaratan.
2. Pemberian pakan tidak dicampur dengan antibiotik dan hormon.
3. Bahan baku pakan, pelengkap pakan, dan imbuhan pakan, tidak membahayakan ikan, manusia, dan

lingkungan, serta harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

4. Bahan baku pakan, pelengkap pakan, dan imbuhan pakan, sebelum digunakan harus dilakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium terhadap kandungan bahan asing, bahan kimia, mikro-organisme, dan zat beracun.

Penggunaan pupuk, probiotik, desinfektan, serta obat ikan, dan bahan kimia lainnya pada proses produksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal;
2. sesuai dengan ketentuan dan petunjuk pada etiket dan brosur;
3. etiket harus menggunakan Bahasa Indonesia;
4. tidak mengalami perubahan fisik (tekstur, warna, dan bau);
5. kemasan, wadah, atau pembungkusannya tidak rusak;
6. sesuai dengan peruntukannya;
7. tidak kadaluarsa;
8. obat ikan yang termasuk golongan obat keras, penggunaannya harus dengan petunjuk dokter hewan;

obat ikan yang termasuk golongan obat bebas terbatas dan/atau obat bebas, penggunaannya mengikuti petunjuk pemakaian yang telah ditetapkan.

Pembudidaya ikan masih belum banyak yang menerapkan CBIB dalam usahanya hingga saat ini. Sosialisasi mengenai budidaya ikan sistem CBIB perlu dimaksimalkan agar kuantitas dan kualitas produksi ikan lele di Indonesia semakin baik. Dukungan terhadap pemerintah dalam mencanangkan program tersebut perlu dilakukan. Penyediaan informasi-informasi pendukung mengenai sistem CBIB penting dilakukan agar manfaat sistem budidaya tersebut dapat diterima baik oleh masyarakat luas. Penelitian mengenai aplikasi metode-metode pada sistem CBIB yang terbukti dapat meningkatkan kuantitas produksi telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Arief dkk. (2014) dan Elpawati dkk. (2015) membuktikan bahwa pencampuran probiotik pada pakan ikan yang merupakan salah satu metode pada sistem CBIB dapat meningkatkan laju pertumbuhan dan efisiensi pakan pada budidaya ikan lele.

Aplikasi probiotik pada media budidaya ikan lele juga terbukti dapat memperbaiki kualitas air selama budidaya berlangsung (Rachmawati dkk., 2015). Informasi penting yang masih belum tersedia untuk mendukung sosialisasi sistem CBIB adalah pengaruh sistem budidaya tersebut terhadap mutu daging ikan lele.

Dari sosialisasi yang dilakukan, sebagian besar masyarakat, dan khususnya para petambak dan pertenak ikan, menolak keras program tersebut. Sebagian menyebutkan, bahwa petambak yang memiliki *sertifikat CBIB* telah memiliki izin dalam bentuk paten untuk melakukan budidaya ikan yang tidak menggunakan metode CBIB, terlepas dari adanya fakta bahwa tanah Sultan berada di area zona konservasi.

Antipati terhadap CBIB juga disebabkan adanya anggapan bahwa Pemkot Kota Yogyakarta berlaku diskriminatif, karena penerapan kebijakan ini hanya fokus pada kelompok yang memiliki fasilitas di wilayah Pantai Selatan, sementara di lokasi lain, lokasi perikanan yang tidak berizin tidak turut dikenakan program. Selain itu, keberadaan budidaya ikan dan tambak udang liar juga diposisikan sebagai terdakwa, dan bukannya sebagai korban akibat model pembangunan wilayah yang sentralistik yang mendorong kesenjangan sosial antara desa-kota.

Sejarah komunikasi pembangunan dimulai sejak tahun 60-an, dengan spesialis tentang penerapan program pembangunan. Sejak dari pengertian tersebut kemudian dikenal dengan sebutan komunikasi pembangunan (Nasution, 2012). Menurut Waskita (2005) dan Mardismo (2002), komunikasi pembangunan dapat dimaknai sebagai seni dan ilmu komunikasi manusia yang diterapkan pada negara dan masyarakat untuk percepatan transformasi dari kemiskinan menuju negara dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis, yang memungkinkan terjadinya kesetaraan sosial dan peningkatan kualitas manusia.

Scrampickal (2006) juga menjelaskan komunikasi pembangunan lebih kepada upaya menginformasikan, menyadarkan, mendidik dan mencerahkan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang lebih

baik. Dengan demikian, secara substansial, komunikasi pembangunan merupakan aktivitas komunikasi dalam penyampaian informasi, ide atau gagasan baru kepada masyarakat. Jika dilihat dari prosesnya, komunikasi pembangunan dapat dipandang sebagai segala upaya, cara dan teknis penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan kepada masyarakat yang menjadi sasaran, agar mereka dapat memahami, menerima dan berpartisipasi dalam pembangunan secara berkelanjutan.

Program CBIB yang dilakukan Timker CBIB diluar *kebiasaan* pendekatan yang lazim dilakukan oleh pemerintah. Timker CBIB menerapkan komunikasi *bottom-up development planning for society*, yang mengedepankan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembentukan dan implementasi kebijakan. Disisi lain, pendekatan ini memungkinkan para aktor dominan untuk menunjukkan motivasi dan kepentingan mereka terhadap terhadap program CBIB.

Teori Sistem Luhmann (Hardiman, 2008) mencoba menjelaskan bahwa sistem sosial akan tetap hadir meskipun terjadi perubahan di dalamnya. Luhmann menyatakan bahwa sistem sosial bersifat autopoiesis yang berarti bahwa sistem tersebut dapat mencukupi dirinya sendiri. Artinya, ketika terjadi konflik dan atau perubahan dalam sistem sosial yang menyebabkan terganggunya fungsi-fungsi, sistem sosial akan menciptakan dan atau menggantikan fungsi-fungsi tersebut dengan sendirinya. Oleh sebab itulah maka sistem sosial tidak akan menjadi ambruk. Karena apabila ada suatu fungsi yang terganggu maka akan segera digantikan dengan fungsi yang baru dengan sendirinya dari dalam sistem itu sendiri.

Luhmann membangun suatu teori sistem yang berbeda dari Parsons meskipun teorinya didasarkan pada pemikiran Talcott Parsons. Tulisan ini akan mencoba mengulas secara singkat pokok-pokok pemikiran teori sistem yang dibangun oleh Niklas Luhmann.

Pendekatan partisipatif yang dapat digunakan dalam *community engagement* didasarkan pada model internasional Association of Public Participation (IAP2) spectrum, yang dilihat sebagai aktifitas berkelanjutan, seperti yang digambarkan dalam berikut:



Gambar 1. IAP2 Public Participation Spectrum (sumber: www.iap2.org.au)

Community engagement merupakan salah satu strategi yang dimaksudkan untuk mengurangi sinisme dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kebijakan dan pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Proses ini menandakan adanya pergeseran paradigma radikal yang kontras dengan ide dimana pemerintah bertindak sebagai penyedia layanan untuk warga negara pasif (Keban, 2000).

Konteks *engagement* dalam penelitian ini berfokus pada partisipasi antara Pemkab Bantul, yang difasilitasi oleh Timker CBIB, dengan masyarakat melalui pemangku kepentingan yang terlibat. Menjadi tantangan bagi Timker CBIB selaku pelaksana program untuk mengembangkan mekanisme dan cara kerja untuk mengatasi keragaman dan dinamika pemangku kepentingan, isu-isu yang menjadi perhatian dan asupan dari pemangku kepentingan, representasi kekuasaan masing-masing aktor yang berkepentingan, dan potensi terjadinya konflik antar sub komunitas akibat perbedaan pandangan dan tujuan mengenai program yang dimaksud.

Komunikasi pembangunan menganut paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat. Sehingga, gagasan mengenai komunikasi pembangunan harus dibarengi dengan adanya partisipasi aktif, penuh inisiatif dan inovatif dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi dalam konteks ini mengandung makna untuk menegakkan demokrasi lokal, dan pemberdayaan sebagai tujuan komunikasi pembangunan mengandung makna dinamis untuk mengembangkan diri dari dalam.

Interaksi yang terjadi antara para aktor ini, bagi peneliti menarik untuk dieksplorasi secara mendalam. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “*Bagaimana dinamika komunikasi para pemangku kepentingan dalam Program CBIB di Kabupaten Bantul.*”

2. METODE

Penelitian yang digunakan untuk membedah fenomena tentang dinamika komunikasi dalam kegiatan penyuluhan Timker CBIB merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan metode studi kasus (Creswell, 2013). Pada penelitian ini, kasus yang diambil menjadi fokus adalah dinamika komunikasi pada program CBIB yang dilakukan oleh timker CBIB yang akan dianalisis dengan teori dinamika komunikasi.

Lokasi penelitian dipilih dengan menggunakan metode purposive, atau secara sengaja dipilih oleh peneliti. Penelitian dilakukan di Kecamatan Sanden, Kab. Bantul, Prop. DI Yogyakarta. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Kecamatan Sanden merupakan lokasi pelaksanaan kegiatan penyampaian pesan untuk program CBIB, dengan demikian, lokasi tersebut dapat menjadi representasi dari dinamika komunikasi yang terjadi antara timker CBIB dengan elemen-elemen pemangku kepentingan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan observasi atau pengamatan lapangan, wawancara mendalam dengan informan, dan *focus group discussion* (FGD). Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yang mencakup tiga tahap yakni menangkap fenomena, pemrosesan data dan kategorisasi data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Aktor-aktor dalam program CBIB

Selain tim kerja CBIB sebagai komunikator utama dalam proses komunikasi penyampaian pesan timker CBIB, terdapat beberapa aktor yang memainkan peran penting dan memiliki motivasi dengan program CBIB. Aktor yang berhasil diidentifikasi adalah Asosiasi

Perikanan Usaha Yogyakarta (APPAYO). Asosiasi ini memfasilitasi kepentingan para prngusaha perikanan untuk mendapatkan sertifikasi yang menjadi prasyarat utama untuk mendapatkan sertifikasi dari budidaya, termasuk menyediakan bantuan hukum bila diperlukan. Dalam CBIB, APPAYO menempatkan diri sebagai katalisator antara Pemkab Bantul dengan petambak udang tersertifikasi.

Liliweri (2011) menggunakan model komunikasi dimanis untuk mendiskusikan pesan-pesan yang dikirimkan dalam suatu proses komunikasi, artinya fokus model ini berada pada 'penerima', dengan perspektif interaktif 'aksi-reaksi'. Selain interaksional, komunikasi juga berjalan secara transaksional, yang berfokus pada 'makna' yang saling dipertukarkan dengan memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi proses komunikasi.

Dinamika komunikasi yang terjadi pada proses sertifikasi CBIB ini menunjukkan diagram yang unik. Ada kelompok yang mendukung, menentang, berdiri pada sisi ketengahan dan ada pula yang bersikap tidak peduli.

3.2. Dinamika Komunikasi Program CBIB di Desa Srigading

Mayoritas penduduk di desa Srigading menganut agama Islam Kejawen. Pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan program CBIB dengan menggunakan pendekatan rohani. Timker CBIB me

Seperti di desa Srigading, dinamika komunikasi yang terjadi di desa ini dapat dilihat dengan memetakan aktor yang terlibat, motivasi, dan kompensasi yang diharapkan dari adanya program CBIB.

1. APPAYO memposisikan diri kontra dengan pemegang sertifikat yang tidak peraturan dari pemerintah Provinsi DIY dan Dinas Kelautan dan perikanan serta menyatakan dukungannya pada tim kerja CBIB untuk segera merealisasikan program CBIB.
2. Investor perikanan dan tambak udang masih sebatas menjadi pengamat, dengan alasan arah dan tujuan program CBIB ini masih mendatangkan keuntungan bagi investasi perikanan dan tambak udang walaupun pindah lokasi

kolam dan tambak, namun meminta kejelasan yang jelas tentang sistem yang berjalan pada program CBIB.

3.3. Dinamika Komunikasi pada Program CBIB di desa Gadingsari

Kegiatan penyampaian pesan program translokasi di desa Gadingsari, menghasilkan tiga kesepakatan, yaitu penggunaan dan penyediaan lahan terstandarisasi yang terpusat dan tidak mengganggu tanaman palawija, dengan standarisasi pengolahan air limbah yang dibangun sendiri, pengembangan industri kreatif dan pembentukan komunitas yang dikelola masyarakat sekitar.

Konteks yang dimaksud adalah teknis dalam pendirian kolam untuk budidaya perikanan di wilayah pesisir pantai selatan. Konsep ini akan menjadi pesan yang akan disampaikan oleh tim kerja CBIB pada prosesnya. Hal ini terkait dengan isi pesan yang akan disampaikan oleh tim kerja CBIB kepada kelompok sasaran. Lahirnya konsep ini berdasar pada kebutuhan lingkungan, terdapat dua konsep budidaya perikanan dan tambak udang yang merupakan inti dari pesan penyampaian program CBIB:

1. Kawasan budidaya CBIB yang bersertifikat. Program ini dimaksudkan untuk menata Pantai selatan sebagai destinasi wisata pantai dengan nama Pantai Pengklik. Hal ini diwujudkan dengan rencana pengelolaan kawasan budidaya yang diserahkan pengelolaannya langsung kepada masyarakat desa Gadingsari melalui BUMDes Gadingsari dibawah pengawasan langsung pemerintah kecamatan.
2. Kawasan budidaya perikanan dan tambak udang berwawasan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat pesisir pantai. Seperti konsep pertama, ide dari pengembangan kawasan adalah untuk memberdayakan masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir, dengan memperkenalkan inovasi-inovasi atau ide-ide baru kepada masyarakat, agar dapat diadopsi dan dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya.

Dinamika komunikasi yang terjadi di desa Gadingsari dapat dilihat dengan memetakan aktor yang terlibat, motivasi, dan kompensasi yang diharapkan dari adanya program CBIB.

1. Penduduk desa Gadingsari tidak setuju dan cenderung kontra dengan timker CBIB atas rencana sertifikasi CBIB. Selama ini warga telah merasa dirugikan dengan adanya kolam ikan dan tambak udang liar yang tidak memperhatikan kebutuhan warga akan lingkungan yang bersih dan sehat. Adanya tim kerja CBIB dikhawatirkan akan memberikan dampak lingkungan yang sama seperti kegiatan tambak sebelumnya.
2. Petani lahan pesisir kontra dengan AMPAS dan tim kerja CBIB yang berkeinginan tetap mendirikan kolam-kolam ikan terpusat di dekat lahan-lahan pesisir yang dianggap produktif, sehingga akan merusak tanaman pesisir. Pemegang *kekancingan*, dan AMPAS, menyetujui program CBIB namun dengan syarat atau kompensasi. AMPAS setuju apabila terdapat kejelasan dari pemegang sertifikat CBIB secara kebermanfaatannya.

4. KESIMPULAN

Dari hasil identifikasi aktor diperoleh beberapa temuan yang mengklarifikasi bahwa para aktor bertindak berdasarkan preferensi yang mereka miliki. Dalam pendekatan partisipatoris yang dilakukan oleh Timker CBIB, para aktor tidak memberikan pengaruh baik secara kualitas maupun kualitas terhadap kebijakan. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan sosial kapital para stakeholder agar mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat yang mereka usung. Isu-isu yang terpetakan terkait dengan CBIB berkisar pada empat isu utama yang terkait erat dengan kehidupan masyarakat di pesisir di Kab. Bantul, yakni:

1. Aspek sosial. Resiko terjadi konflik sosial (pembebasan lahan, akibatnya masyarakat kehilangan aset *Sultan Ground* yang dipinjamkan). Tuntutan pemegang alas hak dapat menimbulkan diskriminasi jenis baru, dan berpotensi menimbulkan kerawanan sosial antar

penduduk yang berimbas pada proses sertifikasi cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dan kebermanfaatannya.

2. Aspek lingkungan. Pencemaran lingkungan dan zona konservasi pesisir pantai selatan menjadi perhatian utama, sebab pendirian kolam ikan tanpa sertifikasi hanya mampu memenuhi kebutuhan pada satu sisi namun mengabaikan aspek lainnya (kualitas ikan tidak layak). Atas dasar itulah masyarakat menolak pendirian kolam ikan dengan atau tanpa sertifikat CBIB yang secara nyata dapat merusak lingkungan secara nyata bila dikerjakan di garis sepadan pantai.
3. Aspek politik. Eskloitasi isu-isu untuk kepentingan beberapa pihak, adanya ketidakpastian akan efek dari keberlangsungan program (keamanan aset pemerintah, misalnya) apabila isu-isu tersebut dimainkan ketika program sedang berjalan.

Model pembangunan yang berbasis komunitas ini tidak hanya didasarkan pada pengalaman strategi dan kebijakan pembangunan nasional pada masa lalu, tetapi juga pengalaman dari negara-negara maju yang di kemudian hari mendorong terjadinya reorientasi dan perubahan paradigma pembangunan dari ekonomi sentral (*capital centered development*) kepada manusia sebagai pusat utama pembangunan (*people centered development*).

Berdasarkan sikap dan pengaruh para aktor, terdapat beberapa pertimbangan yang harus dipahami pihak pemerintah daerah kabupaten Bantul pada program CBIB budidaya perikanan, yakni :

1. Aktor dalam komunitas memiliki peranan yang penting dalam menentukan keberhasilan program pemerintah. Masing-masing aktor juga membawa kepentingan dan isunya sendiri dalam komunikasi yang terjadi. Oleh sebab itu, pemerintah harus memberikan respon yang sesuai dengan harapan dan ekspektasi dari masing-masing aktor. Pemetaan isu dan para pemangku kepentingan dalam tahap awal sosialisasi program dengan demikian menjadi penting untuk dilakukan, agar proses dialog yang

terjadi tidak hanya sekedar sebagai alat untuk mensukseskan program kebijakan semata.

2. Motivasi warga untuk berpartisipasi bergantung pada tingkat pengaruh yang dirasakan warga terhadap pemerintah, semangat dan komitmen mereka untuk komunitasnya atau untuk isu-isu tertentu. Masing-masing individu perlu untuk didengarkan, dan dengan melakukan hal tersebut meningkatkan kesempatan akan kesuksesan program.
3. Salah satu prinsip dari komunikasi pembangunan adalah mendorong partisipasi warga secara total dalam setiap program pembangunan, dengan demikian pendekatan yang perlu dilakukan bukan lagi bersifat 'menginformasikan' melainkan 'melibatkan.'

REFERENSI

Jurnal, Bulletin, dan Majalah Ilmiah

- [1] Liliwari A. 2011. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011;23-24
- [2] Elpawati, Dianna R.P. dan Nani R. 2015. Aplikasi *Effective Microorganism 10 (EM10)* untuk Pertumbuhan Ikan Lele Sangkuriang (*Clarias gariepinus* var. Sangkuriang) di Kolam Budidaya Lele Jombang, Tangerang. *Jurnal Biologi*. 8 (1): 6-14.
- [3] Rachmawati, D., Istiyanto S. dan Heryoso S. 2015. Manajemen Kualitas Air Media Budidaya Ikanlele Sangkuriang (*Clarias gariepinus*) dengan Teknik Probiotik pada Kolam Terpal di Desa Vokasi Reksosari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. *PENA Akuatika*. 12 (1): 24-32.
- [4] Nasution Z. 2001. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.2011;124-126
- [5] Scrampikal, J.. *Development and Participatory Communication*. Journal of Communication Research Trends. 2006;25(2): 2-43

- [6] Griffin, Em. *A First Look At Communication Theory*. New York: McGraw Hill Companies. 2012; 145-147
- [7] Creswell J.W. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013; 75-80
- [8] Keban J, Yeremias. *Analisis Peran dalam Penentuan Alternatif Kebijakan Publik*. MAP-UGM, Yogyakarta. 2000; 35-47
- [9] Waskita D. *Komunikasi Pembangunan Untuk Pemberdayaan*. Jurnal Organisasi dan Manajemen. 2005; 1 (1); 32-40
- [10] Melkote, Srinivas R., Steevesm H. Leslie. *Communication for Development in the Third World: Theory and Practice for Empowerment*. New Dehli: Sage Publications. 2013; 234-237
- [11] Wijaya, Ida Suryani. *Dinamika Komunikasi Organisasi di Perguruan Tinggi*. Jurnal Dakwah Tabligh, 2013; 14. (2); 2-8. Desember 2013. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2015
- [12] Mardismo. *New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik*. Jurnal SINERGI. 2002; 6 (1). Hal 34-42
- [13] Hardiman, F. Budi .*Teori Sistem Niklas Luhmann*. *Jurnal Filsafat Driyarkara Tahun XXIX No. 3/2008*. Jakarta: Senat Mahasiswa STF Driyarkara. 2008; 3

Buku

- [14] Littlejohn, Stephen W & Foss, Karen A. *Theories of Human Communication*.USA: The Thompson Corporation. 2003; Hal 10-15

Tesis, Disertasi

- [15] Fajri C. *Dinamika Komunikasi Organisasi Forum Joglo*. (studi kasus terhadap dinamika komunikasi internal dan eksternal organisasi Forum Joglo Kotagede Yogyakarta 2010-2013). Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. UGM; 2013
- [16] Lindarwati, Lisa. *Komunikasi Pembangunan dan Kemandirian*

Desa. (Studi kasus Pemanfaatan Portal Desa Membangun di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2012).Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. UGM; 2011

[17] Amin Mahmud. Model Komunikasi Pembangunan Dalam Penyediaan

Prasarana Perdesaan di Kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah. (studi Kasus Desa Mondomenak dan Purwosari Kabupaten Demak. Tesis. Magister Tehnik Pembangunan Wilayah dan Kota. UNDIP; 2007